

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kebijakan pendidikan di Indonesia merupakan hasil dari proses panjang kebijakan pendidikan nasional. Peralihan dari sentralisasi pendidikan menjadi desentralisasi pendidikan memberikan peranan penting bagi peningkatan kualitas hasil pendidikan yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 pada Bab VII tentang Bagian Program Pembangunan Bidang Pendidikan, khususnya sasaran (3), yaitu “Terwujudnya manajemen pendidikan yang berbasis pada sekolah dan masyarakat (*school community based management*),” merupakan tonggak utama pergeseran manajemen pendidikan nasional. Mengacu pada sasaran kebijakan tersebut, langkah penting yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia adalah memulai reformasi sistem pendidikan nasional. Untuk itu, disusunlah sistem baru pendidikan nasional yang akhirnya ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Di antara isu utama yang diangkat dalam UU tersebut adalah persoalan pengelolaan pendidikan. Pada Pasal 5 ayat (1) disebutkan, “Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/ madrasah”.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Sisdiknas, institusi sekolah mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Keberhasilan tujuan pendidikan bisa sangat tergantung bagaimana pihak sekolah/madrasah mengelolanya. Dalam operasionalisasi kebijakan ini diperlukan peraturan-peraturan atas undang-undang tersebut. Di antara peraturan penting terkait dengan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah ini adalah Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087 Tahun 2004 tentang Standar Akreditasi

Sekolah, khususnya tentang manajemen berbasis sekolah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, khususnya standar pengelolaan sekolah, yaitu manajemen berbasis sekolah (MBS).

Melalui sistem ini, sekolah dan masyarakat diharapkan mampu memenuhi kebutuhan sekolah sesuai dengan kemampuan dan tuntutan sekolah. Dengan kemandirian yang diberikan ini, sekolah juga diharapkan lebih berdaya dalam mengembangkan program-program yang direncanakan. Sekolah tersebut akan lebih lincah dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya sekolah lebih optimal. Di samping itu, masyarakat sebagai *stakeholders* sekolah diharapkan terlibat secara aktif dalam meningkatkan pengembangan sekolah. Keterlibatan ini adalah upaya untuk membentuk rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap sekolah, sekaligus untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pendidikan.

Secara teoritik, manajemen berbasis sekolah (MBS) yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia ini mengacu pada gagasan yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumberdaya sekolah dan mendorong sekolah meningkatkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sekolah atau untuk mencapai tujuan mutu sekolah dalam kerangka pendidikan nasional. Dengan demikian, rumus esensi dari MBS = otonomi sekolah + fleksibilitas + partisipasi untuk mencapai sasaran mutu sekolah (Rohiat 2008: 55).

Mutu pendidikan, menurut kajian Departemen Pendidikan Nasional secara umum ditentukan oleh tingkat keberhasilan beberapa faktor, antara lain: faktor kebijakan, manajemen sekolah dan pendidikan, sarana, fasilitas, dan prasarana, tenaga kependidikan, pelayanan minimal, serta upaya pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan, baik berkenaan dengan mutu skolastik maupun non skolastik. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional mutu pendidikan ditentukan oleh sejauhmana tercapainya upaya pendidikan yang diukur dari tujuan pendidikan sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang sistem pendidikan nasional (Departemen Pendidikan Nasional, 2001: 82).

Ada dua institusi utama yang menjadi ujung tombak konsep MBS yakni, dewan pendidikan dan komite sekolah. Keduanya dianggap sebagai perwakilan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, khususnya sekolah. “Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan, diperlukan wadah yang dapat mengakomodasi pandangan, aspirasi, dan menggali potensi masyarakat untuk menjamin demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas. Salah satu wadah tersebut adalah Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan Komite Sekolah ada di tingkat satuan pendidikan.” (Departemen Pendidikan Nasional, 2002:88).

Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) sudah membuat panduan umum, bahkan secara legal formal juga dikeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Kepmendiknas) nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah. Keputusan inilah yang akan dijadikan sebagai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk membentuk dua institusi tersebut. Secara mendetail pemerintah memberi penjelasan mengenai dua lembaga tersebut. Mulai dari nama, tata cara pembentukan hingga peran, dan fungsinya.

Hal tersebut memerlukan strategi besar dan tidak bisa langsung menerapkan MBS tanpa didahului diagnosis terhadap masyarakat, kebijakan yang bernama MBS ini sulit untuk memperbaiki pendidikan. Selain kesiapan sekolah dan masyarakat, birokrat pendidikan juga menjadi masalah penting. Selama ini manajemen pendidikan yang cenderung *top down* dan dikuasai negara merupakan hambatan yang tidak mudah untuk merubahnya.

Bank Dunia dalam studinya pun mengakui bahwa masalah demokrasi bisa menentukan berhasil atau gagalnya implementasi kebijakan MBS. MBS akan berjalan dengan baik bila kondisi demokrasi telah berjalan dengan baik termasuk adanya dukungan dari faktor eksternal lokal (Ade Irawan, dkk. 2004: 55).

Dengan demikian, persoalan kebijakan MBS ini ternyata tidaklah sekadar melaksanakan peraturan perundang-undangan. Kebijakan MBS memerlukan perencanaan yang matang. Perencanaan strategis merupakan salah satu bagian dalam upaya peningkatan mutu. Sebagaimana yang dikatakan Edward Sallis

dalam bukunya yang berjudul *Total Management in Education*, “*Quality does not just happen. It must be planned for. Quality needs to be approached systematically using a rigorous strategic planning process. Strategic planning is one of the major plan to TQM. Without clear long-term direction the institution cannot plan for quality improve.*” (Edward Sallis, 1993:107).

Problem perencanaan strategis, seperti yang diungkapkan oleh Sallis tersebut, merupakan persoalan tersendiri dalam konsep manajemen. Perencanaan strategis sebagaimana dikemukakan oleh Boseman dan Phatak (1989), bahwa proses manajemen atau perencanaan strategis mencakup tujuh bagian yang saling berkaitan, yaitu:

1. Penilaian terhadap organisasi, dalam hal kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan (*strengths, weakness, opportunities, and threats* atau disingkat sebagai SWOT).
2. Perumusan misi organisasi.
3. Perumusan falsafah dan kebijakan organisasi.
4. Penetapan sasaran-sasaran strategis.
5. Penetapan strategi organisasi.
6. Implementasi strategi organisasi.
7. Pengendalian (*control*) strategi organisasi.

Selain persoalan perencanaan (*planning*), dalam perspektif manajemen adalah analisis tentang proses. Dalam hal ini Henri Fayol menyatakan bahwa fungsi administratif umum terdapat lima hal, yaitu: *planning, organizing, commanding, dan controlling*. Kelima fungsi ini pun dilengkapi oleh Luther Gulick menjadi tujuh unsur, yaitu: *planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting* (Rohiat, 2008:18).

Sebuah kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika hanya matang dalam perumusan kebijakan dan perencanaannya semata. Problem implementasi kebijakan merupakan problem yang seringkali diabaikan oleh para perumus kebijakan. Para perumus seringkali kurang memperhatikan detail persoalan yang terjadi lapangan dan para pelaku implementasinya. Apalagi kesenjangan antara sebuah kebijakan dengan implementasi sangat jauh.

Dalam mengkaji masalah implementasi kebijakan seringkali menggunakan pendekatan studi kasus. Melalui studi kasus, seringkali dapat digunakan untuk menggali dan mengupas secara detail tentang persoalan-persoalan dalam penerapan sebuah penerapan kebijakan dengan menganalisis faktor-faktor penting dalam implementasi kebijakan publik.

Sebuah pendekatan dalam mengkaji implementasi kebijakan publik yang cukup penting bagi pembuat kebijakan yang pernah ada adalah yang dilakukan oleh Graham Allison dalam *Essence of Decision*. Allison mengemukakan tiga model pembuat kebijakan, yaitu: aktor rasional, proses organisasi, dan model politik birokrasi. Untuk proses organisasi dan politik birokrasi mengacu pada standar prosedur operasi (SOP) dan politik birokrasi, secara berturut-turut dapat memberikan kepekaan bagi pentingnya faktor-faktor dalam pembuatan kebijakan (George C. Edwards III, 1980:7).

Pendekatan implementasi kebijakan ini berbeda dengan kajian evaluasi. Kajian evaluasi, biasanya, lebih mengacu pada perbandingan tujuan program yang berorientasi pada hasil (*outcome*) atau menilai suatu dampak program. Meskipun pendekatan evaluasi ini bisa membantu untuk menganalisa kebijakan, tetapi pendekatan evaluasi tidak dapat menunjukkan cerita kesuksesan atau kegagalan kebijakan publik secara menyeluruh bagaimana pelaksanaan di lapangan secara mendetail. Sedangkan pendekatan implementasi kebijakan akan lebih fokus pada faktor-faktor penting bagi pembuat kebijakan secara umum dan juga bagaimana para pelaku kebijakan dalam mengimplementasikan dalam satu unit kerja yang khusus.

Pertanyaan awal yang muncul dalam kajian implementasi kebijakan adalah persiapan apa saja yang diperlukan agar implementasi kebijakan bisa berhasil? Apa hambatan utama yang akan menghadang kesuksesan implementasi kebijakan?

Untuk menjawab pertanyaan ini, George C. Edward III (1980) mengajukan 4 (empat) faktor atau variabel untuk menganalisa implementasi kebijakan ini. Keempat faktor atau variabel dalam implementasi kebijakan tersebut adalah: komunikasi (*communication*), sumberdaya (*resources*), sikap (*dispositions or attitudes*), dan struktur birokrasi (*bureacratic structure*).

Menurut Edward III, keempat faktor tersebut yang bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lainnya untuk menunjang dan menguatkan dalam implementasi kebijakan. Dan idealnya sebuah pendekatan adalah dapat mencerminkan kompleksitas ini dengan membahasnya sekaligus (George C. Edward III, 1980:10).

Berlakunya kebijakan pengelolaan pendidikan yang berbasis sekolah, kewenangan manajemen yang diberikan kepada sekolah menjadi penting untuk melihat bagaimana sekolah tersebut dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan tersebut. Adapun karakteristik dari manajemen berbasis sekolah ini adalah pendekatan sistem, yaitu *input*, proses, dan *output* untuk memandunya. Pendekatan ini didasarkan oleh pemahaman bahwa sekolah merupakan sebuah sistem sehingga penguraian karakteristik manajemen berbasis sekolah (yang juga karakteristik sekolah) efektif didasarkan pada *input*, *process*, dan *output*.

Salah satu sasaran dari kebijakan ini adalah pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan gerbang pertama peserta didik memulai proses pendidikan formal. Proses pembelajaran dalam pendidikan dasar ini sangatlah penting karena dalam jenjang ini sekolah harus mampu membuat pondasi dalam pembentukan karakter peserta didiknya (*character building*). Dalam konteks globalisasi yang tengah dihadapi saat ini, pendidikan dasar memiliki peranan yang sangat penting, meski kadang terabaikan.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan umum merupakan pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir pendidikan. Sekolah dasar sebagai bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program enam tahun menentukan keberhasilan murid dalam memperoleh dasar-dasar pendidikan yang penting untuk pendidikan selanjutnya.

Tidak ada yang tidak sepakat bahwa dunia pendidikan dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia. Upaya peningkatan kualitas ini secara otomatis harus didukung semua pihak, dimulai dari pemerintah sebagai

pemegang kebijakan, pengelola sekolah dan masyarakat yang merupakan bagian dari *stakeholders* pendidikan.

Kedudukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah menjadi lebih kuat karena telah diatur dalam Pasal 56 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan ketentuan tersebut, Komite Sekolah telah dibentuk hampir di seluruh satuan pendidikan dasar dan menengah. Komite Sekolah telah dibentuk dengan harapan agar Komite Sekolah dapat melaksanakan 4 (empat) peran, yakni sebagai (1) *advisory agency*, (2) *supporting agency*, (3) *controlling agency*, dan (4) mediator antara sekolah dengan masyarakat. Pelaksanaan empat peran tersebut secara optimal diharapkan mampu meningkatkan mutu layanan pendidikan.

Hubungan kelembagaan antara Komite Sekolah dengan Kepala Sekolah dan guru bukan hubungan hirarkhis (biasanya pada gambar struktur organisasi dihubungkan ditandai garis), tetapi merupakan hubungan kemitraan yang bersifat koordinatif (biasanya pada gambar struktur organisasi dihubungkan dengan garis putus-putus). Sementara hubungan antara guru dengan kepala sekolah merupakan hirarkhis. Namun demikian hubungan ketiga lembaga tersebut suatu model hubungan kerja sama dan koordinasi dalam rangka implementasi MBS.

Kewajiban guru sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tentang Guru Pasal 52 ayat (1) mencakup **kegiatan pokok** yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan tugas pokok. Dalam penjelasan Pasal 52 ayat (1) huruf (e), yang dimaksud dengan “tugas tambahan”, misalnya menjadi pembina pramuka, pembimbing kegiatan karya ilmiah remaja, dan guru piket.

Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional (Depdiknas, 2006), terdapat tujuh peran utama kepala sekolah yaitu, sebagai : (1) *educator* (pendidik); (2) manajer; (3) *administrator*; (4) *supervisor* (penyelia); (5) *leader* (pemimpin); (6) pencipta iklim kerja; dan (7) wirausahawan (<http://www.psb-psma.org/content/blog/peran-kepala-sekolah-dalam-meningkatkan-kompetensi-guru>).

Koordinasi adalah kerja sama dalam melaksanakan tugas-tugas yang berbeda sehingga tidak terjadi pekerjaan yang sama dikerjakan oleh orang (atau lembaga) yang berbeda pada bagian yang berbeda. Dengan adanya koordinasi tugas untuk tiap-tiap bagian (atau lembaga), pekerjaan akan dikerjakan sesuai dengan rencana dan tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan (Rohiat, 2008:18). Agar implementasi MBS berjalan secara baik maka masing-masing lembaga (Komite Sekolah, Guru, dan Kepala Sekolah) harus memahami tugas, kewajiban, fungsi, dan peran masing-masing lembaga serta membutuhkan koordinasi.

Dengan menelusuri kemunculan MBS di Indonesia, hal ini berkaitan erat dengan masuknya dana bantuan dari negara dan lembaga asing. Hal itu sudah terjadi jauh sebelum Depdiknas menjadikan MBS sebagai kebijakan nasional pada tahun 2000. Dengan berbagai negara dan organisasi pemberi dana maka model pelaksanaan MBS-nya pun berbeda-beda. Misalnya, untuk wilayah SD, Unicef dan Unesco yang menjadi pelopor.

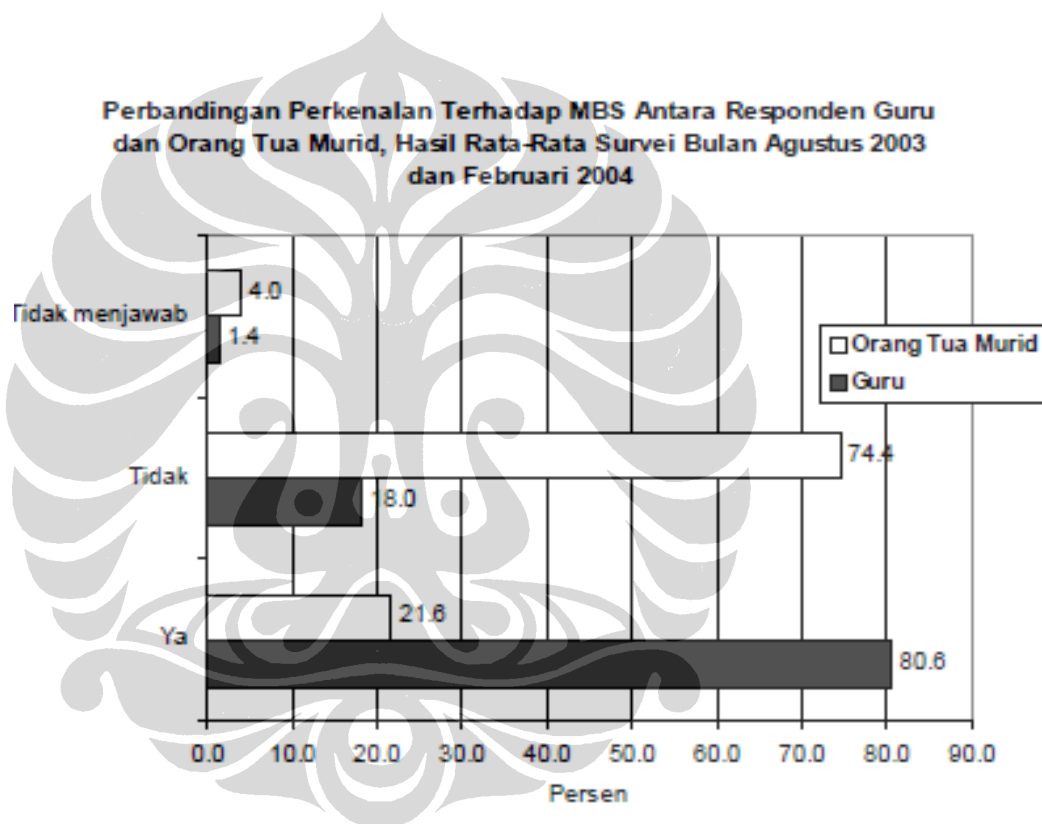
Berdasarkan temuan riset ICW di Jakarta, memperlihatkan bahwa di lapangan selain kurang memperhatikan kondisi struktur (para guru, Komite Sekolah, Kepala Sekolah) dan kultur masyarakat, strategi yang dipakai untuk mengimplementasikan MBS sangat buruk. Hasil, pendekatan lama yang mengandalkan birokrasi masih dipakai, sehingga capaian pelaksanaan kebijakan MBS tidak terwujud. Bahkan ada kecenderungan melahirkan efek negatif, yaitu semakin mahal biaya sekolah (Ade Irawan, dkk. 2004: 70-71).

Hasil dua kali survei ICW memperlihatkan secara lengkap perbandingan pengetahuan mengenai Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) antara responden guru dan orang tua murid. Dari grafik terlihat ada perbedaan yang kontras antara guru dan orang tua murid dalam hal pengetahuan tentang MBS.

Padahal kesuksesan MBS teletak pada pemahaman *stakeholder* (orang tua siswa, masyarakat, guru, bahkan LSM) tentang konsep tersebut dan bagaimana ia dilaksanakan. Sebagian besar responden guru pernah mendengar program ini. Di bulan Agustus 2003, 74 persen responden yang pernah mendengar program ini. Survei serupa di bulan Februari 2004 menemukan 86.3 persen responden guru yang mengenal program ini. Dalam tempo enam bulan

terjadi peningkatan pengetahuan responden guru terhadap keberadaan MBS (Ade Irawan, dkk. 2004: 83).

Grafik1. Pengetahuan guru dan orang tua murid mengenai MBS



Sumber: Ade Irawan, dkk. 2004:85

Dengan hasil penelitian ICW tersebut, peneliti berkeinginan untuk meneliti satu unit Sekolah Dasar Negeri di Jakarta. Pada awal penulisan, peneliti mengajukan kasus tunggal (studi kasus), dengan pertimbangan keterbatasan waktu dan biaya serta secara teoritis penelitian kasus tunggal diperbolehkan.

Penentuan lokus penelitian, peneliti menggunakan teknik sampling dari jumlah SD Negeri di DKI Jakarta yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan

(populasi). Dari populasi tersebut peneliti ingin mengambil 1 SD Negeri sebagai lokus penelitian dengan menggunakan Sampling Gugus Bertahap sebagaimana disebutkan oleh Burhan Bungin (2009:113). Tahap pertama peneliti menentukan 1 kota/kabupaten dari 6 kabupaten kota di DKI Jakarta, hasil sampling diperoleh Kota Jakarta Pusat. Selanjutnya untuk menentukan Kecamatan di Jakarta Pusat yang berjumlah 8 Kecamatan, hasil sampling diperoleh Kecamatan Cempaka Putih. Terdapat struktur birokrasi yang mengurus pendidikan di level Kecamatan, yaitu Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan Cempaka Putih yang menangani 35 SD (26 SD Negeri dan 9 SD Swasta), dan peneliti menentukan populasi SD di level Kecamatan hanya sekolah negeri, hari hasil sampling diperoleh SD Negeri Cempaka Putih Timur 05 Pagi.

Hasil seminar proposal tesis oleh Tim Penguji disarankan menambah satu sekolah lagi sebagai pembanding. Selanjutnya peneliti berkonsultasi dengan Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan Cempaka Putih, dan disarankan supaya satu sekolah yang diambil sebagai lokus penelitian adalah SDSN Cempaka Putih Barat 05 Pagi. Pertimbangannya adalah sekolah tersebut merupakan SD negeri dengan kualitas unggul, pemerintah menyebutnya SDSN (Sekolah Dasar Standar Nasional), di Kecamatan Cempaka Putih hanya ada 1 SDSN.

Sekolah Dasar Negeri (SDN) Cempaka Putih Timur 05 Pagi ini berada di wilayah DKI Jakarta, yang RAPBD-nya mencapai Rp 24,67 Triliun, untuk anggaran pendidikan sebesar Rp 5.46 triliun atau 22.86 persen, yang dibagi untuk operasional pendidikan Rp 2.9 triliun atau 12 persen dari APBD 2010 dan selebihnya Rp 2.6 triliun adalah untuk gaji dan tunjangan guru yang merupakan belanja aparatur. Sedangkan Rencana Anggaran Belanja SDN Cempaka Putih Timur 05 Pagi untuk tahun pelajaran 2009-2010 untuk BOP sebesar Rp162.720.000,00 dan BOS Rp91.200.000,00.

SDN Cempaka Putih Timur 05 Pagi merupakan salah satu sekolah yang menjadi sasaran atas kebijakan MBS ini. Sebagai penyelenggara kebijakan, di SDN Cempaka Putih Timur 05 Pagi ini telah dibentuk Komite Sekolah dalam meningkatkan kualitas dan upaya melengkapi sarana penunjang proses belajar-

mengajar bersama sekolah. Beberapa hasil kerjasama dari komite sekolah adalah membangun lapangan/halaman, membangun taman, tralis ruangan, dan penyediaan kipas angin di ruang kelas.

Peserta didik di SDN Cempaka Putih Timur 05 Pagi ini sebagian besar adalah anak orang tua tidak mampu atau kelompok menengah ke bawah secara strata ekonomi (lebih dari 75% berpenghasilan di bawah UMR DKI Jakarta). Orang tua mereka rata-rata adalah keluarga pendatang yang sadar akan kebutuhan kemajuan pendidikan putra-putrinya. Akan tetapi peran serta bidang keuangannya rendah, karena rata-rata baru berumah tangga, serta kurang peduli terhadap perkembangan bidang akademis anak-anaknya. Fenomena yang ada, sekolah bermutu identik dengan sekolah yang mahal dan hanya dapat dirasakan oleh murid yang orang tuanya cukup kaya atau kelas ekonominya menengah ke atas (Sulitnya Mencari Sekolah yang Bermutu, Kompas, Rabu, 9 Juli 2008).

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan Cempaka Putih, bahwa dari 26 jumlah SD negeri di kecamatan Cempaka Putih, SDN Cempaka Putih Timur 05 mendapat nilai akreditasi yang cukup tinggi yaitu 88,66 (peringkat akreditasi A). Menurut pendapat Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan Cempaka Putih sekolah tersebut layak untuk dijadikan lokus penelitian.

Prestasi empat tahun ajaran, dalam kurun waktu 2003-2007, SDN Cempaka Putih Timur 05 Pagi menunjukkan prestasi yang cukup baik. Tahun ajaran 2003/2004 dan 2004/2005 rerata nilai Ujian Akhir Nasional (UAN) di atas 6, bahkan tahun ajaran 2005/2006 dan 2006/2007 di atas 7.

Berdasarkan data prestasi rerata nilai UAN dan nilai akreditasi di atas menunjukkan bahwa sekolah tersebut dapat mematahkan argumen di atas bahwa sekolah bermutu tidak selalu identik dengan sekolah dari yang orang tuanya masuk kelompok menengah ke atas. Dengan keunikan inilah penulis tertarik untuk menjadikan SDN Cempaka Putih Timur 05 Pagi sebagai obyek penelitian.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan adanya pemetaan sekolah menjadi sekolah kategori standar dan sekolah kategori mandiri, maka setiap

sekolah masih tergolong kategori standar diharuskan untuk memenuhi ke delapan aspek standar yang telah ditentukan dalam SNP tersebut untuk menjadi sekolah standar nasional (SSN). Untuk memudahkan bagi sekolah maupun masyarakat pada umumnya dalam memahami bagaimana wujud sekolah yang telah memenuhi SNP diperlukan contoh nyata, berupa keberadaan Sekolah Standar Nasional.

SDSN menjadi acuan atau rujukan bagi sekolah dasar lain dalam pengembangan sekolah sesuai standar nasional. Sekolah lain yang sejenis, yang berada pada daerah (kecamatan) yang sama, diharapkan dapat terpacu untuk memperbaiki dan mengembangkan diri dalam menciptakan iklim psiko-sosial sekolah untuk menjamin terselenggaranya proses pendidikan yang bermakna, menyenangkan sekaligus berprestasi dalam berbagai bidang sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Sebagai bahan perbandingan atau komparasi dari sekolah yang berkategori biasa (reguler) penulis sengaja mencari satu unit satuan pendidikan yaitu SDSN Cempaka Putih Barat 05 Pagi yang berada di satu wilayah kecamatan. SDSN Cempaka Putih Barat 05 Pagi mempunyai kelebihan yang berbeda, yaitu SDN ini sudah masuk kategori Sekolah Standar Nasional (SSN). Dengan masuknya sekolah masuk dalam kategori yang lebih tinggi, dapat diperkirakan sekolah bersangkutan telah menjalankan sistem manajemen yang lebih baik. Strategi dan fokus pengembangan SSN ini diarahkan pada lima aspek, yaitu melaksanakan manajemen berbasis sekolah (MBS), mengembangkan inovasi pembelajaran, menciptakan komunitas pembelajaran, mengembangkan profesionalisme guru, dan menggalang dukungan masyarakat.

Dengan pertimbangan di atas, kedua sekolah ini akan dijadikan sebagai unit analisis untuk mengetahui perbandingan implementasi kebijakan, sebagaimana pendapat George C. Edward III (1980) yang mengajukan 4 (empat) faktor atau variabel untuk menganalisa implementasi kebijakan ini. Keempat faktor atau variabel dalam implementasi kebijakan tersebut adalah: komunikasi (*communication*), sumberdaya (*resources*), sikap (*dispositions or attitudes*), dan struktur birokrasi (*bureacratic structur*).

Sebagai unit terkecil dalam satuan-satuan sistem pendidikan nasional, SDN Cempaka Putih Timur 05 Pagi dan SDSN Cempaka Putih Barat 05 Pagi ini merupakan basis empirik yang bisa dilihat secara langsung atas implementasi kebijakan pemerintah di bidang pendidikan yang bernama Manajemen Berbasis Sekolah. Kedua sekolah tersebut berada dalam satu koordinasi dalam Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan Cempaka Putih. Dengan membandingkan kedua sekolah yang berada dalam satu wilayah birokrasi ini, diharapkan dapat diketahui faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi MBS masing-masing sekolah.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamatkan agar tiap satuan pendidikan melaksanakan proses belajar mengajar dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.

Berdasarkan uraian di atas, pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi manajemen berbasis sekolah antara SDN Cempaka Putih Timur 05 Pagi dan SDSN Cempaka Putih Barat 05 Pagi?
2. Apa saja faktor-faktor yang mendukung atau menghambat implementasi MBS di SDN Cempaka Putih Timur 05 Pagi dan SDSN Cempaka Putih Barat 05 Pagi?
3. Bagaimana peran Komite Sekolah di SDN Cempaka Putih Timur 05 Pagi dan SDSN Cempaka Putih Barat 05 Pagi dalam implementasi kebijakan MBS?
4. Apa perbedaan implementasi Kebijakan MBS antara di SDN Cempaka Putih Timur 05 Pagi dan SDSN Cempaka Putih Barat 05 Pagi?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh dan mendapatkan gambaran dan perbandingan implementasi manajemen berbasis sekolah (MBS) pada satu satuan pendidikan yaitu SDN Cempaka Putih Timur 05 Pagi dan SDSN Cempaka Putih Barat 05 Pagi.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan implementasi manajemen berbasis sekolah di SDN Cempaka Putih Timur 05 Pagi dan SDSN Cempaka Putih Barat 05 Pagi.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mendukung atau menghambat implementasi MBS di SDN Cempaka Putih Timur 05 Pagi dan SDSN Cempaka Putih Barat 05 Pagi.
3. Menggambarkan peran Komite Sekolah di SDN Cempaka Putih Timur 05 Pagi dan SDSN Cempaka Putih Barat 05 Pagi dalam implementasi MBS.
4. Menjelaskan perbedaan implementasi manajemen berbasis sekolah (MBS) antara di SDN Cempaka Putih Timur 05 Pagi dan SDSN Cempaka Putih Barat 05 Pagi.

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi di SDN Cempaka Putih Timur 05 Pagi dan SDSN Cempaka Putih Barat 05 Pagi khususnya dan sekolah-sekolah lain pada umumnya, serta Departemen Pendidikan Nasional RI dan pihak lain yang terkait sebagai bahan masukan suatu kebijakan di bidang pendidikan utamanya sistem manajemen berbasis sekolah dan pendidikan nasional di Indonesia.

2. Manfaat teoritis

Secara teoritis diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, utamanya kebijakan publik.

1.4. **Sistematika Penulisan**

Penulisan tesis ini disusun dengan sistematika Bab I Pendahuluan, berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Dilanjutkan II Tinjauan Literatur, yang terdiri atas Tinjauan Literatur yang mencakup kebijakan publik, kebijakan pendidikan nasional di Indonesia, kebijakan manajemen pendidikan. Bab III Metode Penelitian mencakup jenis penelitian, fokus penelitian, sumber data, pengumpulan data, dan analisis data. Bab IV Gambaran Umum SDN Cempaka

Putih Timur 05 Pagi dan SDSN Cempaka Putih Barat 05 Pagi yang berisi Sejarah Singkat Perkembangannya, Visi dan Misi Sekolah, Struktur Organisasi, Program Kerja, dan Capaian-capaiannya. Bab V Analisis dan Interpretasi Data, berisi deskripsi Implementasi Kebijakan MBS di SDN Cempaka Putih Timur 05 Pagi dan SDSN Cempaka Putih Barat 05 Pagi. Sebagai Penutup adalah Bab VI yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Bab ini menjelaskan kesimpulan yang diperoleh setelah melakukan penelitian dan rekomendasi nyata sebagai solusi yang diberikan oleh peneliti atas permasalahan yang ditemukan selama penelitian.

